

Dr. Arsalim, S.E., M.Si.

Penyunting: Dr. Ahmad Rustam, M.Pd.

The background of the cover is a photograph of a large crowd of people at a protest or demonstration. Many individuals are holding up white and yellow placards. In the background, a city skyline with several tall skyscrapers is visible under a bright, slightly hazy sky. The title text is overlaid on a dark, semi-transparent rectangular area at the bottom of the image.

TEORI

PEMERINTAHAN

DAN DEMOKRASI

TEORI PEMERINTAHAN

DEMOKRASI &

Penulis

Dr. Arsalim, S.E., M.Si.



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

TEORI PEMERINTAHAN & DEMOKRASI

Copyright @ 2025 By Dr. Arsalim, S.E., M.Si.

All right reserved

Penulis

Dr. Arsalim, S.E., M.Si.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Husnud Diniyah

Editor

Dr. Ahmad Rustam, M.Pd.

Background isi buku di ambil dari [https://www. freepik. com/](https://www.freepik.com/)

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit KBM Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

[https://penerbitkbm. com](https://penerbitkbm.com)

[www. penerbitbukumurah. com](http://www.penerbitbukumurah.com)

Email

[naskah@penerbitkbm. com](mailto:naskah@penerbitkbm.com)

Distributor

[https://penerbitkbm. com/toko-buku/](https://penerbitkbm.com/toko-buku/)

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit. kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-032-9

Cetakan ke-1, Januari 2026

15,5 x 23 cm, viii + 360 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah).

”

KATA PENGANTAR

Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep-konsep dasar pemerintahan dan demokrasi. Dalam era reformasi dan tuntutan good governance, pemahaman yang mendalam tentang teori pemerintahan dan praktik demokrasi menjadi sangat penting, baik bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi pemerintahan.

Materi dalam buku ini disusun secara sistematis, dimulai dari konsep dasar pemerintahan, teori kedaulatan, sistem pemerintahan daerah, hingga good governance dan hak asasi manusia. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam memahami dinamika pemerintahan dan demokrasi di Indonesia.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pemerintahan dan penguatan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Selamat Membaca!

Kendari, Oktober 2025

Penulis

”

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian buku "Teori Pemerintahan & Demokrasi" ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan moral dan doa selama proses penulisan buku ini.
2. Rekan-rekan dosen dan akademisi yang telah memberikan masukan berharga dalam penyusunan materi buku ini.
3. Lembaga tempat penulis berkarya yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk menyelesaikan buku ini.
4. Penerbit yang telah bersedia menerbitkan dan mendistribusikan buku ini.
5. Para mahasiswa yang telah menjadi inspirasi dalam penulisan buku ini melalui diskusi-diskusi kelas yang produktif.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam proses penyelesaian buku ini.

Semoga kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Semoga bermanfaat.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 PENGANTAR TEORI PEMERINTAHAN	5
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pemerintahan.....	5
B. Fungsi-Fungsi Pemerintahan	14
C. Unsur-Unsur Pemerintahan.....	28
D. Perkembangan Ilmu Pemerintahan.....	30
BAB 3 KONSEP DASAR NEGARA & PEMERINTAHAN	37
A. Teori Asal Mula Negara	37
B. Unsur-Unsur Negara.....	47
C. Bentuk-Bentuk Negara.....	55
D. Bentuk-Bentuk Pemerintahan	66
E. Sistem Pemerintahan	79
F. Hubungan Negara dan Pemerintahan.....	102
BAB 4 TEORI KEDAULATAN	117
A. Hakikat Kekuasaan.....	117
B. Teori Kedaulatan Tuhan.....	123
C. Teori Kedaulatan Raja.....	127
D. Teori Kedaulatan Negara.....	130
E. Teori Kedaulatan Rakyat.....	134
F. Teori Kedaulatan Hukum.....	141

BAB 5 KONSEP KEKUASAAN DALAM PEMERINTAHAN	145
A. Hakikat Kekuasaan.....	145
B. Sumber-Sumber Kekuasaan.....	149
C. Legitimasi Kekuasaan.....	152
D. Teori Pemisahan Kekuasaan.....	155
E. Teori Pembagian Kekuasaan.....	157
F. Sistem Checks and Balances	160
BAB 6 PENGANTAR TEORI DEMOKRASI.....	165
A. Pengertian & Hakikat Demokrasi.....	165
B. Sejarah Perkembangan Demokrasi	168
C. Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi.....	170
D. Nilai-Nilai Demokrasi.....	173
E. Budaya Demokrasi	176
BAB 7 BENTUK-BENTUK DEMOKRASI.....	181
A. Demokrasi Langsung	181
B. Demokrasi Tidak Langsung	183
C. Demokrasi Liberal.....	186
D. Demokrasi Rakyat.....	189
E. Demokrasi Pancasila	191
F. Perbandingan Berbagai Bentuk Demokrasi	194
BAB 8 LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI.....	199
A. Partai Politik.....	199
B. Sistem Pemilihan Umum	202
C. Parlemen dan Legislatif.....	204
D. Lembaga Eksekutif	207
E. Lembaga Yudikatif	210
F. Pers dan Media Massa	212
G. Organisasi Masyarakat Sipil.....	215
BAB 9 PEMERINTAHAN DAERAH.....	219
A. Konsep Pemerintahan Daerah.....	219
B. Asas Desentralisasi.....	222

C.	Asas Dekonsentrasi.....	224
D.	Asas Tugas Pembantuan	227
E.	Otonomi Daerah.....	230
F.	Hubungan Pusat dan Daerah	233
BAB 10 GOOD GOVERNANCE & REFORMASI BIROKRASI		237
A.	Konsep Good Governance.....	237
B.	Prinsip-Prinsip Good Governance.....	240
C.	Akuntabilitas Pemerintahan	244
D.	Transparansi dalam Pemerintahan	247
E.	Partisipasi Masyarakat	250
F.	Reformasi Birokrasi.....	253
G.	Pelayanan Publik.....	256
BAB 11 HAK ASASI MANUSIA & DEMOKRASI		261
A.	Konsep Hak Asasi Manusia.....	261
B.	Sejarah Perkembangan HAM.....	264
C.	Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia	267
D.	HAM dalam Sistem Demokrasi	270
E.	Perlindungan HAM oleh Negara.....	272
F.	Pelanggaran HAM dan Mekanisme Penyelesaiannya.....	275
BAB 12 MASYARAKAT SIPIL & DEMOKRASI.....		279
A.	Pengertian Masyarakat Sipil.....	279
B.	Karakteristik Masyarakat Sipil.....	282
C.	Peran Masyarakat Sipil dalam Demokrasi.....	284
D.	Organisasi Non-Pemerintah (NGO)	286
E.	Gerakan Sosial	289
F.	Kontrol Sosial terhadap Pemerintahan	291
BAB 13 TANTANGAN DEMOKRASI KONTEMPORER.....		295
A.	Globalisasi dan Demokrasi	295
B.	Populisme dan Ancaman Demokrasi.....	298
C.	Korupsi dan Demokrasi.....	300
D.	Terorisme dan Keamanan Nasional	303

E.	Teknologi Informasi dan Demokrasi Digital	306
F.	Masa Depan Demokrasi.....	308
BAB 14 STUDI KASUS PEMERINTAHAN & DEMOKRASI.....		313
A.	Demokrasi di Indonesia	313
B.	Sistem Pemerintahan Presidensial di Amerika Serikat.....	316
C.	Sistem Pemerintahan Parlementer di Inggris.....	319
D.	Demokrasi dan Pemerintahan di Negara-Negara Asia	321
E.	Pembelajaran dari Berbagai Sistem Pemerintahan.....	324
DAFTAR PUSTAKA		329
GLOSARIUM		353
PROFIL PENULIS.....		359



DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2013). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Currency.
- Ackerman, B. (1991). *We the people: Foundations*. Harvard University Press.
- Adji, O. S. (2001). *Peradilan HAM: Indonesia dan Dunia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Almond, G. A., Powell, G. B., Strom, K., & Dalton, R. J. (Eds.). (2004). *Comparative Politics Today: A World View*. Pearson Longman.
- Ames, B. (2001). *The deadlock of democracy in Brazil*. University of Michigan Press.
- Anderson, B. (1983). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso.
- Andeweg, R. B., & Irwin, G. A. (2014). *Governance and politics of the Netherlands* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Archibugi, D. (2008). *The global commonwealth of citizens: Toward cosmopolitan democracy*. Princeton University Press.
- Arendt, H. (1970). *On violence*. Harcourt Brace & Company.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.

- Aspinall, E., & Fealy, G. (Eds.). (2003). *Local power and politics in Indonesia: Decentralisation and democratisation*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Attamimi, A. H. S. (1990). Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV. *Disertasi Doktor dalam Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bachrach, P., & Baratz, M. S. (1962). Two faces of power. *American Political Science Review*, 56(4), 947-952.
- Bagehot, W. (1867). *The English Constitution*. (Berbagai edisi penerbitan modern).
- Bartels, L. M. (2008). *Unequal democracy: The political economy of the new gilded age*. Princeton University Press.
- Bassiouni, M. C. (Ed.). (1999). *International Criminal Law, Volume 1: Crimes*. Transnational Publishers.
- Beetham, D. (1991). *The legitimation of power*. Macmillan.
- Beetham, D. (1994). *Defining and Measuring Democracy*. Sage Publications.
- Bermeo, N. (2016). On democratic backsliding. *Journal of Democracy*, 27(1), 5-19.
- Besley, T., & Coate, S. (2003). Centralized versus decentralized provision of local public goods: A political economy approach. *Journal of Public Economics*, 87(12), 2611-2637.
- Bickel, A. M. (1962). *The least dangerous branch: The Supreme Court at the bar of politics*. Bobbs-Merrill.
- Bieber, F. (2006). *Post-war Bosnia: Ethnicity, inequality and public sector governance*. Palgrave Macmillan.
- Binder, S. A. (2003). *Stalemate: Causes and consequences of legislative gridlock*. Brookings Institution Press.
- Bodin, J. (1992). *On sovereignty: Four chapters from The Six Books of the Commonwealth*. Cambridge University Press.

- Bogdanor, V. (1995). *The monarchy and the constitution*. Oxford University Press.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Harvard University Press.
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Bratton, M., & van de Walle, N. (1997). *Democratic Experiments in Africa: Regime Transitions in a Comparative Perspective*. Cambridge University Press.
- Brodjonegoro, B. (2003). Tiga Skenario Desentralisasi Fiskal di Indonesia dalam Jangka Panjang. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 4(1), 1-22.
- Brubaker, R. (1992). *Citizenship and nationhood in France and Germany*. Harvard University Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Buergenthal, T., Shelton, D., & Stewart, D. (2002). *International Human Rights in a Nutshell*. West Group.
- Bull, M. J., & Newell, J. L. (2005). *Italian politics: Adjustment under duress*. Polity Press.
- Burke, E. (1774). *Speech to the Electors of Bristol*. (Dokumen historis).
- Butler, D., & Ranney, A. (Eds.). (1994). *Referendums Around the World: The Growing Use of Direct Democracy*. American Enterprise Institute.
- Butt, S. (2011). Anti-corruption reform in Indonesia: An obituary? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 47(3), 381-394.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2012). *The Constitution of Indonesia: A contextual analysis*. Hart Publishing.
- Cangara, H. (2014). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Carey, J. M. (2007). Competing principals, political institutions, and party unity in legislative voting. *American Journal of Political Science*, 51(1), 92-107.
- Carneiro, R. L. (2022). A Theory of the Origin of the State. In *Man in Adaptation* (pp. 417-426). Routledge.
- Cassese, A. (2003). *International Criminal Law*. Oxford University Press.

- Cassese, A. (2005). *International law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Castells, M. (2009). *Communication power*. Oxford University Press.
- Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age*. Polity Press.
- Chapman, B. (1955). *The prefects and provincial France*. George Allen & Unwin.
- Cheibub, J. A. (2007). *Presidentialism, parliamentarism, and democracy*. Cambridge University Press.
- Churchill, R. R., & Lowe, A. V. (1999). *The law of the sea* (3rd ed.). Manchester University Press.
- Claessen, H. J. (1986). Kingship in the early state. *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde*, (1ste Afl), 113-127.
- Clastres, P. (2020). Society against the state: Essays in political anthropology.
- Clinton, R. L. (1989). *Marbury v. Madison and judicial review*. University Press of Kansas.
- Cohen, J. L., & Arato, A. (1992). *Civil society and political theory*. MIT Press.
- Crawford, J. (2006). *The creation of states in international law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139-167.
- Cronin, T. E. (1989). *Direct Democracy: The Politics of Initiative, Referendum, and Recall*. Harvard University Press.
- Curran, J., & Gurevitch, M. (Eds.). (2005). *Mass Media and Society* (4th ed.). Hodder Arnold.
- Dahl, R. A. (1957). The concept of power. *Behavioral Science*, 2(3), 201-215.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press.

- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2000). The New Public Service: Serving Rather than Steering. *Public Administration Review*, 60(6), 549–559.
- Diamond, L. (1994). Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation. *Journal of Democracy*, 5(3), 4–17.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*.
- Diamond, L. (2008). *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World*. Times Books.
- Diamond, L. (2010). Liberation technology. *Journal of Democracy*, 21(3), 69–83.
- Diamond, L., & Morlino, L. (Eds.). (2005). *Assessing the Quality of Democracy*. Johns Hopkins University Press.
- Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice* (3rd ed.). Cornell University Press.
- Dunleavy, P., & O'Leary, B. (1987). *Theories of the state: The politics of liberal democracy*. Macmillan.
- Dunning, W. A. (1905). *A history of political theories from Luther to Montesquieu*. The Macmillan Company.
- Duverger, M. (1954). *Political parties: Their organization and activity in the modern state*. Methuen.
- Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. John Wiley & Sons.
- Edwards, M. (2004). *Civil Society*. Polity Press.
- Eide, A. (1995). Economic, social and cultural rights as human rights. In A. Eide, C. Krause, & A. Rosas (Eds.), *Economic, Social, and Cultural Rights: A Textbook*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Elazar, D. J. (1987). *Exploring federalism*. University of Alabama Press.
- Elgie, R. (1999). *Semi-presidentialism in Europe*. Oxford University Press.
- Elgie, R. (2011). *Semi-presidentialism: Sub-types and democratic performance*. Oxford University Press.
- Elster, J. (1995). Forces and mechanisms in the constitution-making process. *Duke Law Journal*, 45(2), 364–396.

- Elster, J., & Slagstad, R. (Eds.). (1988). *Constitutionalism and democracy*. Cambridge University Press.
- Engel, K. H. (2006). Harnessing the benefits of dynamic federalism in environmental law. *Emory Law Journal*, 56(1), 159-188.
- Engels, F. (2001). *The origin of the family, private property and the state*. Wellred Books.
- Erk, J., & Swenden, W. (Eds.). (2010). *New directions in federalism studies*. Routledge.
- Evans, G. (2008). *The responsibility to protect: Ending mass atrocity crimes once and for all*. Brookings Institution Press.
- Figgis, J. N. (1914). *The divine right of kings*. CUP Archive.
- Finer, S. E. (1997). *The history of government from the earliest times* (Vol. 1). Oxford University Press.
- Fishman, R. M. (1990). Rethinking state and regime: Southern Europe's transition to democracy. *World Politics*, 42(3), 422-440.
- Florini, A. M. (Ed.). (2007). *The Right to Know: Transparency for an Open World*. Columbia University Press.
- Føllesdal, A. (1998). Survey article: Subsidiarity. *Journal of Political Philosophy*, 6(2), 190-218.
- Forrer, J., Kee, J. E., Newcomer, K. E., & Boyer, E. (2010). Public-private partnerships and the public accountability question. *Public Administration Review*, 70(3), 475-484.
- Forsyth, M. (1981). *Unions of states: The theory and practice of confederation*. Leicester University Press.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Pantheon Books.
- Foucault, M. (1978). *The history of sexuality, Volume 1: An introduction*. Pantheon Books.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972-1977*. Pantheon Books.
- Foucault, M. (1982). The Subject and Power. *Critical Inquiry*, 8(4), 777-795.
- Foucault, M. (2003). *Society must be defended: Lectures at the Collège de France, 1975-1976*. Picador.

- Foucault, M. (2008). *The birth of biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978-1979*. Palgrave Macmillan.
- Fox, H. (2008). *The law of state immunity* (2nd ed.). Oxford University Press.
- French, J. R. P., & Raven, B. (1959). The bases of social power. In D. Cartwright (Ed.), *Studies in social power* (pp. 150-167). University of Michigan Press.
- Friedrich, C. J. (1963). *Man and His Government: An Empirical Theory of Politics*. McGraw-Hill.
- Friedrich, C. J., & Brzezinski, Z. K. (1965). *Totalitarian dictatorship and autocracy* (2nd ed.). Harvard University Press.
- Fukuyama, F. (1992). *The End of History and the Last Man*. Free Press.
- Fukuyama, F. (2004). *State-building: Governance and world order in the 21st century*. Cornell University Press.
- Fukuyama, F. (2004). *State-building: Governance and world order in the 21st century*. Cornell University Press.
- Gallagher, M., & Mitchell, P. (Eds.). (2005). *The Politics of Electoral Systems*. Oxford University Press.
- Garner, B. A. (Ed.). (2009). *Black's Law Dictionary* (9th ed.). West Group.
- Gaventa, J. (2004). Towards Participatory Governance: Assessing the Transformative Possibilities. In S. Hickey & G. Mohan (Eds.), *Participation: From Tyranny to Transformation?* (pp. 25-41). Zed Books.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks* (Q. Hoare & G. N. Smith, Trans.). International Publishers.
- Greenberg, J. (2009). *The struggle for constitutional power: Law, politics, and economic development in Egypt*. Cambridge University Press.
- Greif, A. (2006). *Institutions and the path to the modern economy: Lessons from medieval trade*. Cambridge University Press.
- Gutmann, A., & Thompson, D. (2004). *Why Deliberative Democracy?*. Princeton University Press.
- Habermas, J. (1975). *Legitimation Crisis* (T. McCarthy, Trans.). Beacon Press.

- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Hadi, A. P. (2001). *Civil Society dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Halim, A. (2007). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hamilton, A., Madison, J., & Jay, J. (2003). *The Federalist Papers* (C. Rossiter, Ed.). Signet Classics. (Karya asli terbit 1788).
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hatta, M. (1960). *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pandji Masjarakat.
- Havel, B. F., & Sanchez, G. S. (2014). *The principles and practice of international aviation law*. Cambridge University Press.
- Heald, D. (2006). Transparency as an Instrumental Value. In C. Hood & D. Heald (Eds.), *Transparency: The Key to Better Governance?* (pp. 59–73). Oxford University Press.
- Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., & Perraton, J. (1999). *Global transformations: Politics, economics and culture*. Stanford University Press.
- Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. (2003). Seize the state, seize the day: State capture and influence in transition economies. *Journal of Comparative Economics*, 31(4), 751–773.
- Herb, M. (1999). *All in the family: Absolutism, revolution, and democracy in the Middle Eastern monarchies*. State University of New York Press.
- Herbst, J. (2015). *States and power in Africa: Comparative lessons in authority and control: Comparative lessons in authority and control*. Princeton University Press.
- Hicks, U. K. (1978). *Federalism: Failure and success*. Macmillan.
- Hobbes, T. (1996). *Leviathan*. Cambridge University Press. (Original work published 1651)
- Hoessein, B. (2001). *Perubahan Model Hubungan Pusat-Daerah dan Implikasinya terhadap Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan*. Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta.

- Hoessein, B. (2009). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Hooghe, L., & Marks, G. (2003). Unraveling the central state, but how? Types of multi-level governance. *American Political Science Review*, 97(2), 233-243.
- Horowitz, D. L. (1985). *Ethnic groups in conflict*. University of California Press.
- Horowitz, D. L. (2013). *Constitutional change and democracy in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Hume, D. (1994). *Political essays*. Cambridge University Press. (Original work published 1748)
- Hunt, R. C., & Hunt, E. (1976). Canal irrigation and local social organization. *Current Anthropology*, 17(3), 389-411.
- Huntington, S. P. (1991). *The third wave: Democratization in the late twentieth century*. University of Oklahoma Press.
- Hurd, I. (1999). Legitimacy and authority in international politics. *International Organization*, 53(2), 379-408.
- Ishaq. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ishay, M. R. (2008). *The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era*. University of California Press.
- Isnaeni, H. (2014). Sistem Pemerintahan Presidensial dan Implikasinya Terhadap Mekanisme Checks and Balances antara Legislatif dan Eksekutif di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 456-477.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlemen dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jellinek, G. (1900). *Allgemeine Staatslehre*. O. Häring.
- Kaelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaho, J. R. (2005). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kalyvas, A. (2005). Popular sovereignty, democracy, and the constituent power. *Constellations*, 12(2), 223-244.

- Kann, R. A. (1950). *The multinational empire: Nationalism and national reform in the Habsburg monarchy, 1848-1918* (Vol. 1). Columbia University Press.
- Katz, R. S., & Crotty, W. (Eds.). (2006). *Handbook of Party Politics*. Sage Publications.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). *The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues*. World Bank Policy Research Working Paper, (5430).
- Ker-Lindsay, J. (2012). *The foreign policy of counter secession: Preventing the recognition of contested states*. Oxford University Press.
- Khan, Q. (2018). Al-Mawardi's theory of the state. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 465-479. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2017-0210>
- Kooiman, J. (Ed.). (1993). *Modern Governance: New Government-Society Interactions*. Sage Publications.
- Krabbe, H. (1915). *Die Lehre der Rechtssouvereinität*. J.C.B. Mohr.
- Krasner, S. D. (1999). *Sovereignty: Organized hypocrisy*. Princeton University Press.
- Krasner, S. D. (1999). *Sovereignty: Organized hypocrisy*. Princeton University Press.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan, T. (2015). Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 11(1), 1-22.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan Sinar Bakti.
- Kusnardi, M., & Saragih, B. (1995). *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- LaPalombara, J., & Weiner, M. (Eds.). (1966). *Political Parties and Political Development*. Princeton University Press.

- Lasswell, H. D. (1948). The Structure and Function of Communication in Society. In L. Bryson (Ed.), *The Communication of Ideas* (pp. 37–51). Harper & Brothers.
- Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (1950). *Power and Society: A Framework for Political Inquiry*. Yale University Press.
- Lauren, P. G. (2011). *The Evolution of International Human Rights: Visions Seen* (3rd ed.). University of Pennsylvania Press.
- Lauterpacht, H. (1947). *Recognition in international law*. Cambridge University Press.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) & Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN.
- Lenin, V. I. (1917). *The State and Revolution*. (Berbagai edisi penerbitan modern).
- Lenvine, C. H. (Ed.). (1990). *The New Public Management and Modernization of the Public Sector*. Edward Elgar Publishing.
- Lerner, G. (1986). *The creation of patriarchy*. Oxford University Press.
- Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). *Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War*. Cambridge University Press.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How democracies die*. Crown Publishing Group.
- Lewis, D. E. (2008). *The politics of presidential appointments: Political control and bureaucratic performance*. Princeton University Press.
- Liddle, R. W. (1992). The Politics of Development Policy. *Prisma (English Edition)*, (53), 33-45.
- Lijphart, A. (1977). *Democracy in plural societies: A comparative exploration*. Yale University Press.
- Lijphart, A. (1992). *Parliamentary versus presidential government*. Oxford University Press.
- Lijphart, A. (1994). *Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945-1990*. Oxford University Press.
- Lijphart, A. (1999). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries*. Yale University Press.
- Lincoln, A. (1863). *The Gettysburg Address*. (Dokumen historis).

- Linz, J. J. (1990). The perils of presidentialism. *Journal of Democracy*, 7(1), 51-69.
- Lipset, S. M. (1959). Some social requisites of democracy: Economic development and political legitimacy. *American Political Science Review*, 53(1), 69-105.
- Livingston, W. S. (1956). A note on the nature of federalism. *Political Science Quarterly*, 67(1), 81-95.
- Locke, J. (1689). *Two Treatises of Government*. (Berbagai edisi penerbitan modern).
- Loughlin, M. (2003). *The idea of public law*. Oxford University Press.
- Lukes, S. (1974). *Power: A radical view*. Macmillan.
- Lukes, S. (2005). *Power: A Radical View* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Maine, H. S. (1861). *Ancient law: Its connection with the early history of society and its relation to modern ideas*. John Murray.
- Mainwaring, S. (1993). Presidentialism, multipartism, and democracy: The difficult combination. *Comparative Political Studies*, 26(2), 198-228.
- Mainwaring, S., & Shugart, M. S. (Eds.). (1997). *Presidentialism and democracy in Latin America*. Cambridge University Press.
- Mamdani, M. (1996). *Citizen and subject: Contemporary Africa and the legacy of late colonialism*. Princeton University Press.
- Manan, B. (2005). *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Manin, B. (1997). *The Principles of Representative Government*. Cambridge University Press.
- Mann, M. (1986). *The sources of social power: Volume 1, A history of power from the beginning to AD 1760*. Cambridge University Press.
- Marcus, J., & Feinman, G. M. (1998). *Archaic states*. School of American Research Press.
- Martinich, A. P. (2005). *Hobbes*. Routledge.
- Marx, K., & Engels, F. (1848). *The Communist Manifesto*. (Berbagai edisi penerbitan modern).
- Mawhood, P. (Ed.). (1983). *Local Government in the Third World: The Experience of Tropical Africa*. John Wiley & Sons.

- Mayo, H. B. (1960). *An Introduction to Democratic Theory*. Oxford University Press.
- Mayo, H. B. (1960). *An Introduction to Democratic Theory*. Oxford University Press.
- McChesney, R. W. (2004). *The problem of the media: US communication politics in the 21st century*. Monthly Review Press.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187.
- McLaughlin, A. C. (1905). *The confederation and the constitution, 1783-1789*. Harper & Brothers.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory* (6th ed.). Sage Publications.
- MD, M. M. (2000). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- MD, M. M. (2001). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press.
- MD, M. M. (2009). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- MD, M. M. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Menkhaus, K. (2007). Governance without government in Somalia: Spoilers, state building, and the politics of coping. *International Security*, 31(3), 74-106.
- Messner, J. J., Haken, N., Taft, P., Blyth, H., Murphy, C., & Fiertz, C. (2013). Failed States Index 2013. *The Fund for Peace*.
- Mettler, S., & Lieberman, R. C. (2020). *Four threats: The recurring crises of American democracy*. St. Martin's Press.
- Mietzner, M. (2009). *Military politics, Islam, and the state in Indonesia: From turbulent transition to democratic consolidation*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Mietzner, M. (2013). *Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia*. NUS Press.

- Mill, J. S. (1859). *On Liberty*. (Berbagai edisi penerbitan modern).
- Mills, C. W. (1956). *The power elite*. Oxford University Press.
- Mintzberg, H. (1983). *Power In and Around Organizations*. Prentice-Hall.
- Montesquieu, C. D. S. (1748). *De l'esprit des loix (The Spirit of the Laws)*. (Berbagai edisi penerbitan modern).
- Montesquieu, C. D. S. (1748). *De l'esprit des loix (The Spirit of the Laws)*. (Berbagai edisi penerbitan modern).
- Montesquieu, C. D. S. (1748). *De l'esprit des loix (The Spirit of the Laws)*. (Berbagai edisi penerbitan modern).
- Moravcsik, A. (1998). *The choice for Europe: Social purpose and state power from Messina to Maastricht*. Cornell University Press.
- Moreno, L. (2001). *The federalization of Spain*. Frank Cass Publishers.
- Morsink, J. (1999). *The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting, and Intent*. University of Pennsylvania Press.
- Mounk, Y. (2018). *The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It*. Harvard University Press.
- Müller, W. C., & Strøm, K. (Eds.). (2000). *Coalition governments in Western Europe*. Oxford University Press.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Neustadt, R. E. (1990). *Presidential power and the modern presidents: The politics of leadership from Roosevelt to Reagan*. Free Press.
- Norris, P. (2004). *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*. Cambridge University Press.
- North, D. C. (1981). *Structure and change in economic history*. W. W. Norton & Company.
- Notonagoro. (1974). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. Public Affairs.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120-1149.

- O'Donnell, G. (1994). Delegative democracy. *Journal of Democracy*, 5(1), 55-69.
- O'Donnell, G. (1998). Horizontal Accountability in New Democracies. *Journal of Democracy*, 9(3), 112-126.
- O'Donnell, G., Schmitter, P. C., & Whitehead, L. (Eds.). (1986). *Transitions from authoritarian rule: Comparative perspectives*. Johns Hopkins University Press.
- O'Donnell, G., Schmitter, P. C., & Whitehead, L. (Eds.). (1986). *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*. Johns Hopkins University Press.
- Olson, D. M. (1994). *Democratic Legislative Institutions: A Comparative View*. M.E. Sharpe.
- Olson, M. (1993). Dictatorship, democracy, and development. *American Political Science Review*, 87(3), 567-576.
- Oppenheimer, F. (1975). *The state*. Free Life Editions. (Original work published 1908)
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12-40.
- Parsons, T. (1963). On the concept of political power. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 107(3), 232-262.
- Pateman, C. (1970). *Participation and Democratic Theory*. Cambridge University Press.
- Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- Perrine, M., & Mounk, Y. (2018). The separation of powers and democratic stability. Working Paper.
- Persily, N., & Tucker, J. A. (Eds.). (2020). *Social media and democracy: The state of the field, prospects for reform*. Cambridge University Press.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (Eds.). (2004). *Politicization of the civil service in comparative perspective: The quest for control*. Routledge.

- Pfeffer, J. (1992). *Managing with Power: Politics and Influence in Organizations*. Harvard Business School Press.
- Philpott, D. (2016). Sovereignty. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2016 ed.). Stanford University.
- Pierre, J. (Ed.). (2000). *Debating Governance: Authority, Steering, and Democracy*. Oxford University Press.
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. University of California Press.
- Pohle, J., & Thiel, T. (2020). Digital sovereignty. *Internet Policy Review*, 9(4), 1-19.
- Polsby, N. W. (1960). How to Study Community Power: The Pluralist Alternative. *The Journal of Politics*, 22(3), 474–484.
- Polsby, N. W. (1975). Legislatures. In F. I. Greenstein & N. W. Polsby (Eds.), *Handbook of Political Science, Vol. 5: Governmental Institutions and Processes*. Addison-Wesley.
- Prasojo, E. (2012). *Reformasi Birokrasi dan Governansi di Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Dalam *Simposium Nasional II & Sarasehan Nasional Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AIAN)*.
- Prescott, J. R. V., & Triggs, G. D. (2008). *International frontiers and boundaries: Law, politics and geography*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Przeworski, A., Stokes, S. C., & Manin, B. (Eds.). (1999). *Democracy, Accountability, and Representation*. Cambridge University Press.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Putnam, R. D. (with Leonardi, R., & Nanetti, R. Y.). (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Qvortrup, M. (2017). *Direct democracy: A comparative study of the theory and practice of government by the people*. Manchester University Press.

- Rahim, M. A. (1989). Relationships of Leader Power to Compliance and Satisfaction with Supervision: Evidence from a National Sample of Managers. *Journal of Management*, 15(4), 545–556.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Reynolds, A., Reilly, B., & Ellis, A. (2005). *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).
- Rhodes, R. A. W. (1996). The New Governance: Governing without Government. *Political Studies*, 44(4), 652–667.
- Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. Open University Press.
- Riker, W. H. (1964). *Federalism: Origin, operation, significance*. Little, Brown and Company.
- Rondinelli, D. A., & Cheema, G. S. (1983). *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. Sage Publications.
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform*. Cambridge University Press.
- Rotberg, R. I. (Ed.). (2004). *When states fail: Causes and consequences*. Princeton University Press.
- Rothwell, D. R., & Stephens, T. (2016). *The international law of the sea* (2nd ed.). Hart Publishing.
- Rousseau, J. J. (1997). *The social contract and other later political writings*. Cambridge University Press. (Original work published 1762)
- Rowlands, J. (1995). Empowerment examined. *Development in Practice*, 5(2), 101-107.
- Saalfeld, T. (2000). Germany: Stable parties, Chancellor democracy, and the art of informal settlement. In W. C. Müller & K. Strøm (Eds.), *Coalition governments in Western Europe* (pp. 32-85). Oxford University Press.
- Salamon, L. M., & Anheier, H. K. (1992). In Search of the Non-Profit Sector. I: The Question of Definitions. *Voluntas: International*

- Journal of Voluntary and Non-Profit Organizations*, 3(2), 125–151.
- Sartori, G. (1976). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. Cambridge University Press.
- Sartori, G. (1994). *Comparative constitutional engineering: An inquiry into structures, incentives and outcomes*. New York University Press.
- Sarundajang, S. H. (2002). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Schedler, A. (1999). Conceptualizing Accountability. In A. Schedler, L. Diamond, & M. F. Plattner (Eds.), *The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies* (pp. 13–28). Lynne Rienner Publishers.
- Schmitter, P. C., & Karl, T. L. (1991). What Democracy Is... and Is Not. *Journal of Democracy*, 2(3), 75–88.
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press.
- Sen, A. (1999). Democracy as a Universal Value. *Journal of Democracy*, 10(3), 3–17.
- Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Harvard University Press.
- Service, E. R. (1975). *Origins of the state and civilization: The process of cultural evolution*. W. W. Norton & Company.
- Shaw, M. N. (2017). *International law* (8th ed.). Cambridge University Press.
- Shue, H. (1980). *Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy*. Princeton University Press.
- Shugart, M. S., & Carey, J. M. (1992). *Presidents and assemblies: Constitutional design and electoral dynamics*. Cambridge University Press.
- Shugart, M. S., & Carey, J. M. (1992). *Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics*. Cambridge University Press.
- Siahaan, M. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

- Sidik, M. (2002). *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Siebert, F. S., Peterson, T., & Schramm, W. (1956). *Four Theories of the Press*. University of Illinois Press.
- Skocpol, T. (1985). Bringing the state back in: Strategies of analysis in current research. In P. B. Evans, D. Rueschemeyer, & T. Skocpol (Eds.), *Bringing the state back in* (pp. 3-37). Cambridge University Press.
- Skowronek, S. (1982). *Building a new American state: The expansion of national administrative capacities, 1877-1920*. Cambridge University Press.
- Slamet, Y. (2003). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Slaughter, A. M. (2004). *A new world order*. Princeton University Press.
- Smith, A. D. (1991). *National identity*. University of Nevada Press.
- Soehino. (2005). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Sorensen, G. (2008). *Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World* (3rd ed.). Westview Press.
- Spencer, H. (1876). *The principles of sociology*. D. Appleton and Company.
- Springborg, P. (Ed.). (2007). *The Cambridge Companion to Hobbes's Leviathan*. Cambridge University Press.
- Stepan, A. (1999). Federalism and democracy: Beyond the US model. *Journal of Democracy*, 10(4), 19-34.
- Stepan, A., & Skach, C. (1993). Constitutional frameworks and democratic consolidation: Parliamentarism versus presidentialism. *World Politics*, 46(1), 1-22.
- Stiglitz, J. E. (1999). On Liberty, the Right to Know, and Public Discourse: The Role of Transparency in Public Life. *Oxford Amnesty Lecture*.
- Stockwin, J. A. A. (2008). *Governing Japan: Divided politics in a resurgent economy* (4th ed.). Wiley-Blackwell.
- Stoker, G. (1998). Governance as Theory: Five Propositions. *International Social Science Journal*, 50(155), 17-28.

- Strange, S. (1996). *The retreat of the state: The diffusion of power in the world economy*. Cambridge University Press.
- Strøm, K., Müller, W. C., & Bergman, T. (Eds.). (2003). *Delegation and accountability in parliamentary democracies*. Oxford University Press.
- Strong, C. F. (1966). *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*. Sidgwick & Jackson.
- Suberu, R. T. (2001). *Federalism and ethnic conflict in Nigeria*. United States Institute of Peace Press.
- Suhelmi, A. (2001). *Pemikiran politik Barat: Kajian sejarah perkembangan pemikiran negara, masyarakat dan kekuasaan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sukma, R., & Saragih, H. Y. (Eds.). (2009). *Demokrasi dan Demokratisasi di Indonesia: Sebuah Tinjauan Awal*. CSIS.
- Sun, T. (2010). Government transparency and its impact on public trust. *Peking University, China-USA Business Review*, 9(8), 44-51.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Syam, F. (2007). *Pemikiran politik Barat: Sejarah, filsafat, ideologi, dan pengaruhnya terhadap dunia ke-3*. Bumi Aksara.
- Talmon, J. L. (1952). *The origins of totalitarian democracy*. Secker & Warburg.
- Tamanaha, B. Z. (2004). *On the rule of law: History, politics, theory*. Cambridge University Press.
- Thoha, M. (2007). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tillin, L. (2007). United in diversity? Asymmetry in Indian federalism. *Publius: The Journal of Federalism*, 37(1), 45-67.
- Tilly, C. (1975). Reflections on the history of European state-making. In C. Tilly (Ed.), *The formation of national states in Western Europe* (pp. 3-83). Princeton University Press.
- Tilly, C. (1990). *Coercion, capital, and European states, AD 990-1990*. Blackwell.
- Tocqueville, A. de. (1835). *Democracy in America*. (Berbagai edisi penerbitan modern).

- Tuck, R. (2016). *The sleeping sovereign: The invention of modern democracy*. Cambridge University Press.
- Ullmann, W. (2013). *A history of political thought: The Middle Ages*. Routledge.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: UNDP.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: UNDP.
- United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*. United Nations.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.
- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*.
- United Nations. (1966). *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.
- Usman, S. (2015). Kedaulatan yang berlaku di negara hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2).
- UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Van Boven, T. C. (1982). Distinguishing Criteria of Human Rights. In K. Vasak & P. Alston (Eds.), *The International Dimensions of Human Rights* (Vol. 1, pp. 43-59). Greenwood Press.
- Vasak, K. (1977). A 30-year struggle: The sustained efforts to give force of law to the Universal Declaration of Human Rights. *The UNESCO Courier*, 30(11), 29-32.
- Vassil, K., Solvak, M., Vinkel, P., Lust, T., & Trechsel, A. H. (2016). The diffusion of internet voting: Usage patterns of internet voting in Estonia between 2005 and 2015. *Government Information Quarterly*, 33(3), 453-459.

- VeneKlasen, L., & Miller, V. (2002). *A new weave of power, people and politics: The action guide for advocacy and citizen participation*. World Neighbors.
- Vile, M. J. C. (1998). *Constitutionalism and the separation of powers* (2nd ed.). Liberty Fund.
- Wade, E. C. S., & Bradley, A. W. (1993). *Constitutional and Administrative Law* (11th ed.). Longman.
- Wasistiono, S. (2003). *Kapita Selektta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Wasistiono, S., & Tahir, M. I. (2007). *Prospek Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Watts, R. L. (2008). *Comparing federal systems* (3rd ed.). McGill-Queen's University Press.
- Weber, M. (1946). Politics as a vocation. In H. H. Gerth & C. Wright Mills (Trans. & Eds.), *From Max Weber: Essays in sociology* (pp. 77-128). Oxford University Press.
- Welch, E. W., Hinnant, C. C., & Moon, M. J. (2005). Linking Citizen Satisfaction with E-Government and Trust in Government. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 15(3), 371–391.
- Wheare, K. C. (1963). *Federal government* (4th ed.). Oxford University Press.
- Wheare, K. C. (1963). *Legislatures*. Oxford University Press.
- Witte, J., & Alexander, F. S. (Eds.). (2008). *Christianity and law: An introduction*. Cambridge University Press.
- Wittfogel, K. A. (1957). *Oriental despotism: A comparative study of total power*. Yale University Press.
- Wood, E. M. (1996). From Citizen to "Economic Man": The First Wave of Democritization. A historical-materialist critique. *New Left Review*, I/215, 99-105.
- World Bank. (2017). *World development report 2017: Governance and the law*. World Bank Publications.
- Yukl, G., & Falbe, C. M. (1991). Importance of Different Power Sources in Downward and Lateral Relations. *Journal of Applied Psychology*, 76(3), 416–423.

- Zakaria, F. (1997). The Rise of Illiberal Democracy. *Foreign Affairs*, 76(6), 22–43.
- Zimmerman, J. F. (1999). *The New England Town Meeting: Democracy in Action*. Praeger.
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.



GLOSARIUM

Akuntabilitas Pemerintahan - Pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan dan kebijakannya kepada rakyat atau lembaga yang berwenang.

Asas Dekonsentrasi - Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Asas Desentralisasi - Penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

Asas Pembantuan - Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Asas Tugas Pembantuan - Penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Budaya Demokrasi - Nilai-nilai, norma, dan praktik yang mendukung pelaksanaan sistem demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Demokrasi Liberal - Sistem demokrasi yang menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan ekonomi pasar bebas.

Demokrasi Langsung - Sistem demokrasi di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik tanpa melalui wakil.

Demokrasi Pancasila - Sistem demokrasi Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, mengutamakan musyawarah mufakat.

Demokrasi Rakyat - Sistem demokrasi yang menekankan kedaulatan rakyat dan partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan.

Demokrasi Terpimpin - Sistem demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia (1959-1966) dengan peran dominan presiden dalam pengambilan keputusan.

Demokrasi Tidak Langsung - Sistem demokrasi di mana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk mengambil keputusan politik.

Efektivitas Pemerintahan - Kemampuan pemerintah dalam mencapai tujuan dan melaksanakan kebijakan secara optimal dengan sumber daya yang tersedia.

Efisiensi Fungsi Pemerintahan - Penggunaan sumber daya pemerintahan secara optimal untuk mencapai hasil maksimal.

Good Governance - Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum.

Hak Asasi Manusia (HAM) - Hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Hakikat Demokrasi - Esensi atau inti dari sistem demokrasi yang menekankan kedaulatan rakyat dan persamaan hak.

Hakikat Kekuasaan - Esensi dari kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perilaku orang atau kelompok lain.

Hubungan Negara dan Pemerintahan - Kaitan antara negara sebagai organisasi politik dengan pemerintahan sebagai pelaksana kekuasaan negara.

Hubungan Pusat dan Daerah - Relasi kewenangan, pembagian tugas, dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia - Klasifikasi HAM meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain.

Konsep Good Governance - Kerangka pemikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Konsep Hak Asasi Manusia - Pemahaman teoretis tentang hak-hak fundamental yang dimiliki setiap manusia.

Konsep Pemerintahan - Kerangka pemikiran tentang sistem dan mekanisme penyelenggaraan kekuasaan negara.

Konsep Pemerintahan Daerah - Pemahaman teoretis tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD.

Legitimasi Kekuasaan - Pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap kewenangan pemerintah untuk memerintah.

Lembaga Eksekutif - Lembaga negara yang menjalankan fungsi pelaksanaan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan.

Lembaga Legislatif - Lembaga negara yang memiliki fungsi membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah.

Lembaga Yudikatif - Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Nilai-Nilai Demokrasi - Prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar pelaksanaan sistem demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.

Otonomi Daerah - Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Paradigma Good Governance - Cara pandang atau kerangka berpikir tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Parlemen dan Legislatif - Lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Partai Politik - Organisasi politik yang dibentuk oleh warga negara untuk memperjuangkan kepentingan politik dan mengikuti pemilihan umum.

Partisipasi Masyarakat dan Sipil - Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan.

Pelanggaran HAM dan Penanganan Penyelesaiannya - Tindakan yang melanggar hak asasi manusia beserta mekanisme penyelesaiannya.

Pelayanan Publik - Pemberian layanan kepada masyarakat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kepentingan umum.

Pembagian Kekuasaan - Distribusi kekuasaan negara kepada berbagai lembaga untuk mencegah pemusatan kekuasaan.

Pemisahan Kekuasaan - Pemisahan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ke dalam lembaga yang berbeda (trias politica).

Pengertian dan Hakikat Demokrasi - Definisi dan esensi dari sistem pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat.

Pengertian dan Ruang Lingkup Pemerintahan - Definisi pemerintahan dan cakupan kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.

Pengertian Kedaulatan - Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak terbatas oleh kekuasaan lain.

Perkembangan Ilmu Pemerintahan - Evolusi studi tentang teori dan praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Perkembangan Teori Demokrasi - Evolusi pemikiran dan konsep tentang sistem demokrasi dari masa ke masa.

Perlindungan HAM oleh Negara - Upaya negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia warga negaranya.

Pers dan Media Massa - Lembaga komunikasi massa yang berperan dalam penyebaran informasi dan pengawasan terhadap pemerintah.

Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi - Nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan sistem demokrasi seperti kedaulatan rakyat dan persamaan hak.

Prinsip-Prinsip Good Governance - Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dll.

Reformasi Birokrasi - Upaya perubahan dan perbaikan sistem birokrasi pemerintahan agar lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sejarah Perkembangan Demokrasi - Perjalanan historis perkembangan sistem dan praktik demokrasi di dunia dan Indonesia.

Sejarah Perkembangan HAM - Perjalanan historis pengakuan dan perkembangan hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional.

Sistem Checks and Balances - Mekanisme saling kontrol dan keseimbangan antar lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Sistem Pemilihan Umum - Mekanisme dan tata cara pemilihan wakil rakyat atau pemimpin negara secara demokratis.

Sistem Pemerintahan - Struktur dan mekanisme hubungan antar lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan.

Sumber-Sumber Kekuasaan - Asal-usul atau basis legitimasi kekuasaan seperti tradisi, hukum, karisma, atau demokrasi.

Teori Asal Mula Negara - Berbagai pandangan tentang asal-usul terbentuknya negara seperti teori kontrak sosial, teori kekuatan, dll.

Teori Kedaulatan Hukum - Pandangan bahwa hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara.

Teori Kedaulatan Negara - Pandangan bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi dan mutlak.

Teori Kedaulatan Raja - Pandangan bahwa raja atau penguasa memiliki kekuasaan tertinggi yang berasal dari Tuhan.

Teori Kedaulatan Rakyat - Pandangan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara.

Teori Kedaulatan Tuhan - Pandangan bahwa kekuasaan tertinggi berasal dari dan merupakan kehendak Tuhan.

Teori Pembagian Kekuasaan - Konsep pembagian kekuasaan negara untuk menciptakan checks and balances.

Teori Pemisahan Kekuasaan - Konsep trias politica yang memisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Transparansi dalam Pemerintahan - Keterbukaan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik.

Unsur-Unsur Negara - Elemen-elemen pembentuk negara yaitu wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan internasional.

Unsur-Unsur Pemerintahan - Komponen-komponen yang membentuk sistem pemerintahan seperti lembaga, fungsi, dan mekanisme kerja.



PROFIL PENULIS



Dr. Arsalim, S.E., M.Si. Lahir di Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 Juni 1969. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SD Binaan 5 Kolaka tahun 1982, Tamat SMPN 2 Kolaka tahun 1985, selanjutnya menyelesaikan SMAN Unaaha Kendari tahun 1988. Kemudian melanjutkan studi pada Fakultas Ekonbomi Jurusan Manajemen Univ.Haluoleo Kendari tamat 1994, selanjutnya ke jenjang pascasarjana (S2) Jurusan Manajemen Agribisnis Universitas Hasanuddin Makassar tamat tahun 1997 dan menyelesaikan program Doktor (S3) jurusan Pemerintahan di Universitas Padjajaran Bandung tamat tahun 2014. Mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan diluar dan dalam negeri antara lain, pendidikan non gelar di Adelaide Institute of Tafe South Australia, Australia tahun 2001, Policy and Technology For Energy Conservation and Environmental Protection di Jepang dan Korea Selatan tahun 2008, Leadership Transformation in Indonesia di Universitas Harvard Kennedy School Amerika Serikat tahun 2012, Leadership in Government di La Trobe University Australia tahun 2013, Diklatpim III di LAN Yogyakarta tahun 2009, Diklatpim II LAN Jakarta tahun 2012 dan Diklat Kepemimpinan Pemerintahan di Kemendagri tahun 2017.

Penulis pernah bekerja di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara dan menduduki berbagai jabatan strategis antara lain sebagai Wakil Bupati Konawe Selatan 2016-2021, Kepala Bappeda Konawe Selatan 2015,

Kepala Dinas Pariwisata 2013, dan berbagai jabatan eselon 3 dan 4 lainnya antara tahun 2002 sampai 2009. Saat ini penulis menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) dan Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Sulawesi Tenggara serta Mengajar pada Program Doktor Ilmu Pemerintahan Sekolah Pascasarjana IPDN. Aktif menulis karya ilmiah (buku dan jurnal) antara lain buku Problematika Implementasi Kebijakan Publik (Teori dan Praktek) Tahun 2023; Dimensi-Dimensi Pembangunan Daerah, 2024, Modal Sosial, Model Jaringan dan Konsep Pelayanan Publik, 2023, Isu-Isu Kebijakan Publik, 2023, dan Meniti Langkah Menuai Karya, tahun 2013. Pembangunan Pedesaan 2025, Kelembagaan Daerah, 2024. Kebijakan Publik dan Rintangan Kebijakan, 2025. Memahami Perkembangan Demokrasi, 2025, Desa Masa Depan, 2024. Jurnal Ilmiah yang sudah terbit antara lain; Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Konawe Selatan Vo.4 No.2 Agustus 2024 Arus Jurnal Sosial dan Humaniora; Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Akibat Covid 19 di Kabupaten Konawe Selatan Vol. 5 No. 1 (2023) NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara: Studi Pasca Pelaksanaan Program PNPM-MP Vol 2 No 2: Agustus (2022) Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH); Survei Kepuasan Publik terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Vol 3 No 3: Desember (2023) Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH); Analisis Kebijakan Program Transmigrasi di Kabupaten Konawe Selatan Vol 2 No 3: Desember (2022) Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH), Educational Policy and Curriculum Innovation, A Studi on Impactful Learning in Primary School, Journal LA EDUSCI, 2025.